

KONTROVERSI PERTAMBANGAN BERDASARKAN TELAAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KAJIAN EKO-WISATA UNTUK MENYELAMATKAN EKOLOGI

Ermalindus Albinus Joseph Sonbay

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

e-mail: ermalindo@gmail.com

Abstract: Mining Controversy Based Study Assessing Sustainable Development and Eco-Tourism to Save Ecology. Mining in NTT are controversial because they involve manipulation and engineering of interest surrounding the hegemony of mineral and natural products. Welfare of the people which is used as a propaganda tool precisely wrap beautifully personal benefit of the mining entrepreneur and also the regional administration directly into the shade and the rest of the law and politics of the local entrepreneurs. Mining is not just the affairs of the government and the mining corporations, especially the exclusive community of mining entrepreneurs. Mining requires a dialectic of ideas, the way, the pattern to the rehabilitation of nature that combines holistic and absolute, all stakeholders (stakeholders), all owners of investment and capital (shareholders) and most important of all the people who support the area around, that during all this time to enjoy and meet the daily needs of nature. Forgetting one of the elements is letting the conspiracy that destroys this vision together. Integrative cooperation, open and trustworthy is something that is necessary in this dialectic. Because, only with this cooperation the transfer of technology and knowledge that can humanize and ensuring environmental sustainability can occur.

Keywords: mining, construction, tourism, ecology

Abstrak: Kontroversi Pertambangan Berdasarkan Telaah Pembangunan Berkelanjutan dan Kajian Eko-Wisata untuk Menyelamatkan Ekologi. Pertambangan di NTT menjadi kontroversi karena terjadimanipulasi dan rekayasa kepentingan seputar hegemoni pertambangan mineral dan hasil alam. Kesejahteraan rakyat yang dijadikan alat propaganda justeru membungkus dengan indahnya keuntungan pribadi para pengusaha pertambangan dan juga pemerintahan daerah yang secara langsung menjadi naungan dan sandaran hukum dan politik para pengusaha tersebut. Pertambangan bukan sekadar urusan pemerintah dan korporasi tambang, apalagi komunitas eksklusif pengusaha tambang. Pertambangan membutuhkan dialektika ide, cara, pola hingga rehabilitasi alam yang menggabungkan secara holistik dan mutlak, semua pemangku kebijakan (stakeholder), semua pemilik investasi dan modal (shareholders) dan yang terpenting semua masyarakat yang menghidupi areal sekitar, yang selama sekian waktu menikmati dan memenuhi kebutuhan hariannya dari alam. Melupakan salah satu elemen adalah membiarkan konspirasi yang menghancurkan visi ini secara bersama. Kerja sama yang integratif, terbuka dan terpercaya adalah sesuatu yang niscaya dalam dialektika ini. Karena, hanya dengan kerja sama ini transfer teknologi dan pengetahuan yang bisa memanusiakan manusia dan menjamin adanya kelanjutan lingkungan hidup dapat terjadi.

Kata Kunci: pertambangan, pembangunan, pariwisata, ekologi

PENDAHULUAN

Selepas Konvensi dunia di Rio de Janeiro (1992) mengenai pembangunan berkelanjutan yang mengupas khusus mengenai manajemen hutan

khususnya hutan-hutan tropis secara berkelanjutan, begitu banyak peneliti dan akademisi mulai sadar mengenai adanya ketimpangan dan kekeliruan yang terjadi seiring dengan begitu banyaknya niat untuk

mengeksplorasi sumber daya alam, khususnya mineral-mineral dari sektor pertambangan (Hahn & Knoke, 2010). Dalam artikelnya, Hahn dan Knoke juga membahas kontroversi lanjutan mengenai dualisme pemahaman khususnya dalam pendefinisian makna hakiki pembangunan berkelanjutan.

Kelompok pertama hadir dengan argumennya bahwa pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*, selanjutnya SD) perlu sensitif dan mempertenggangkan ranah kondisi kelestarian hutan dan lingkungan hidup (*Sustainable Forestry and Environmental or Sustainable Forest Management*, selanjutnya SFE dan SFM). Kebutuhan dan keselamatan generasi mendatang dalam menikmati kebijakan pembangunan saat ini dipertanyakan. Sedangkan pendukung konsep yang lain lebih berkonsentrasi pada perkembangan disiplin ilmu mengenai SD dan juga pemberian ruang pada begitu banyak ahli kehutanan untuk mengaktualisasikan temuan, teknologi dan kompetensinya pada kemanusiaan. Posisi kelompok kedua lebih toleran pada eksploitasi dan eksplorasi hasil bumi dan kesempatan re-forestasi setelah de-forestasi pasca eksploitasi dan eksplorasi hutan.

Implikasi buruk dari memberikan beban lebih kepada para ahli hutan dan lingkungan hidup adalah akan muncul begitu banyak ketakadilan bagi kelompok marjinal khususnya untuk waktu mendatang. Para pelaku ekonomi yang lebih mengejar keuntungan tidak akan ambil pusing dengan kondisi kerusakan hutan yang terjadi. Semua itu dianggap menjadi bagian kajian para ahli hutan dan lingkungan hidup. Partisipasi yang digaungkan hanya akan menjadi semacam rantai konspirasi untuk membersihkan luka dan borok pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan unsur masyarakat lokal. Sekalipun demikian SD harus juga dipandang lebih dari sekadar problem mengenai keadilan terhadap generasi mendatang (Norton, 2005). Era sebelum Konvensi Rio, masyarakat tidak pernah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam melahirkan kebijakan pembangunan berkelanjutan, melainkan hanya dalam mengeksekusi sebuah kebijakan mengenai eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam dan mineral yang ada di hutan.

Partisipasi masyarakat yang tersandera permainan dan kepentingan pejabat publik dan korporasi swasta yang berorientasi kapital (*money oriented*) akan semakin menggusur kepentingan dan perkembangan masyarakat. Model ini juga akan menyudutkan masyarakat miskin dan kecil hanya

sebagai objek dalam pembangunan maupun pembangunan berkelanjutan. Ketika pembangunan berkelanjutan sudah dinilai sebagai langkah strategis menyelamatkan begitu banyak dimensi kehidupan selain keuntungan semata, maka posisi relasi pemerintah, masyarakat sipil, pengusaha dan representasi wakil rakyat haruslah menjadi sesuatu yang sejajar (Braun, 2010). Braun juga mengatakan bahwa ini adalah langkah niscaya bagi pembentukan kebijakan publik yang memiliki efek positif bagi lingkungan, manusia dan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Dan dengan sendirinya, eksploitasi alam yang berlebihan dan tidak sadar lingkungan harus ditolak. Karena jika salah satu elemen diabaikan, akan muncul kepincangan yang dengan sendirinya menghancurkan ideal pembangunan berkelanjutan.

Konteks pertambangan berbagai mineral dan kekayaan alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memperlihatkan ragam kepincangan ini. Begitu banyak karakteristik lokal dan juga tatanan kultural dan sosial masyarakat menjadi rusak akibat aktivitas pertambangan. Di antaranya mentalitas kolektif masyarakat, tatanan koordinasi pengelolaan sumber-sumber alam secara kultural, ethos dan daya juang masyarakat serta semangat kerja keras dan pantang menyerah (*Kompas*, 21 Januari 2012). Fenomena ini kian runyam, karena di satu sisi masyarakat terus dirugikan dengan begitu banyak eksploitasi yang masif, dan di sisi lain ada upaya penginstalan kebodohan dan sikap apatis di sisi masyarakat oleh pemerintah dan para pemilik ijin usaha pertambangan. Terhadap situasi yang tidak menguntungkan masyarakat ini, mampukah pertambangan tetap menjadi acuan dalam pembangunan berkelanjutan?

PERTAMBANGAN DI NTT

Dalam Kertas posisinya, Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (*Justice, Peace and Integrity of Creation/JPIC*) dari Keuskupan Agung Ende dan Kongregasi Serikat Sabda Allah (*Societas Verby Divini/SVD*) pada 2010 mengatakan dengan tegas bahwa telah ada manipulasi dan rekayasa kepentingan seputar hegemoni pertambangan mineral dan hasil alam di NTT. Kesejahteraan rakyat yang dijadikan alat propaganda justeru membungkus dengan indahnya keuntungan pribadi para pengusaha pertambangan dan juga pemerintahan daerah yang secara langsung menjadi naungan dan sandaran hukum dan politik para penguasa tersebut.

Keadaan ini diperparah dengan begitu banyak kejadian yang tidak rasional yang dilakukan oleh para pengusaha pertambangan sendiri hanya dengan mengantongi ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Langkah-langkah irasional yang dilakukan antara lain:

Penyerobotan Hutan Lindung

Eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mangan di Kabupaten TTU misalnya mematok wilayah pertambangannya tepat di lokasi hutan lindung yang menjadi sandaran begitu banyak warga sekitar. Hutan lindung ini sangat bermanfaat khususnya dalam menjamin ketersediaan air bagi warga sekitar hutan dan mata air (*“Bahaya, Tambang Merambah Hutan Lindung”*, *Pos Kupang*, 19 Agustus 2012, *Kompas*, 23 Agustus 2012). Tatanan kultural yang begitu mapan, khususnya dalam koordinasi dan pembagian fungsi kepemimpinan secara tradisional di wilayah ini turut tergusur. Mereka yang sebelumnya aktif dalam memelihara sumber mata air dan kelangsungannya bahkan dipaksa untuk segera mengakhiri tugas sosial-kulturalnya tersebut.

Tawaran dan Iming-Iming Kesejahteraan

Rakyat dengan mudah terjebak dalam iming-iming dan janji manis para pengusaha pertambangan karena mereka ditawarkan keuntungan yang sangat menggiurkan. Bahkan mereka dijanjikan materi yang gemerlapan. Hal ini juga yang memotivasi mereka kemudian ikut menjadi bagian dalam pertambangan, sekalipun kebanyakan mereka adalah antek dari kapitalisme itu sendiri (*comprador*).

Rakyat di sekitar lokasi pertambangan atau mereka yang memiliki hak atas lahan yang akan dijadikan areal pertambangan mangan dan emas ditawarkan rumah, pekerjaan yang layak, layanan pendidikan dan kesehatan yang gratis juga sejumlah materi lainnya (*“Warga Dibujuk dengan Sejumlah Tawaran”*, *Pos Kupang*, 1 Oktober 2012). Pola ini juga dilakukan ketika hegemoni pertambangan marmer muncul pada awal tahun 2000-an (*Laporan WALHI NTT*, November 2012). Ketika itu bahkan putri beberapa pemangku adat di wilayah Desa Fatunisuan, TTU, NTT terlibat perkawinan politik-ekonomis dengan beberapa pengusaha pertambangan asal Korea yang sulit memperoleh ijin tinggal dan ijin operasional. Pasca pertambangan semua pasangan yang menikah secara politik-ekonomis ini bercerai.

Pemerintah Daerah dijadikan “Budak”

Tidak sedikit Bupati dan pejabat lokal di NTT digiring ke dalam jebakan pengusaha pertambangan. Dukungan modal bagi kontestasi politik yang diikuti sang pemimpin oleh para pengusaha memiliki konsekuensi logis pada penyediaan ijin dan lahan bagi pertambangan. Bahkan untuk beberapa kasus para bupati tidak lebih dari sapi perah para pengusaha.

Bahkan beberapa suksesi kepemimpinan di tingkat Kabupaten (Pilkada) dicurigai penuh dengan uang hasil sumbangan para pengusaha pertambangan yang coba bermain aman dengan mengendalikan semua calon bupati. Selain bupati dan jajaran eksekutif, pengusaha pertambangan yang menjalankan modal asing maupun modal dalam negeri juga, bermain mata dengan begitu banyak anggota parlemen. Biaya perjalanan dinas dan studi banding di Kabupaten TTU dan TTS disinyalir sebagai hasil dari keuntungan para pengusaha tambang yang dihibahkan ke parlemen (*“Habiskan Rp. 600 Juta, Anggota DPRD Plesiran ke Batam,” Pos Kupang*, 4 Oktober 2012, *KBR68H*, 4 Oktober 2012).

Pertambangan Mengebiri Kreativitas

Setelah masyarakat dan pemerintah terjebak dalam hegemoni tambang, sektor-sektor lain mulai ditinggalkan. Bukti nyata realisasi penerimaan Kabupaten TTU (PAD) yang hanya Rp.30 miliar pada 2010 dari target Rp.50 miliar, atau turun Rp.10 miliar dari tahun 2009 dengan pendapatan Rp.40 miliar menunjukkan dengan jelas bahwa sejak pertambangan mangan menjamur di wilayah ini sejak awal 2008 PAD asli kabupaten ini terus turun setiap tahunnya. Begitu banyak sektor potensial seperti peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata ditinggalkan (*“Sektor Penting Mulai Ditinggalkan”*, *Pos Kupang*, 4 Oktober 2012).

Angka kemiskinan di wilayah ini juga naik dari 65 persen pada 2010 menjadi 78 persen pada 2011 (*Laporan advokasi PADMA NTT*, 2012). Hampir 40 persen petani dan peternak di wilayah ini meninggalkan secara total aktivitas pertanian dan peternakannya dan mengubah mata pencahariannya sebagai pengumpul dan pengepul batu mangan.

Situasi di NTT ini bukan merupakan kasus baru dalam polemik seputar pertambangan dan pembanguan berkelanjutan di Indonesia pada umumnya. Beberapa provinsi lain yang juga tersandera kasus pertambangan yang hanya menguntungkan pemerintah dan pengusaha pertambangan antara lain,

Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi, Kalimantan Barat, Jawa Timur dan NTB. Berdasarkan keterangan Menteri ESDM, Jero Wacik pada awal Desember 2012, pemerintah baru akan berupaya mengumpulkan para pengusaha pertambangan supaya bisa memperoleh hasil dan keterangan yang berimbang ("Tambang Cuma Untungkan Pejabat," Kompas, 5 Desember 2012). Ketika pemerintah di level daerah bisa dikontrol lewat sedikit aliran dana dari pengusaha pertambangan, maka pemerintah di tingkatan pusat bisa diajak untuk semakin mengulur waktu dan tidak mengeluarkan kebijakan yang tegas dan taktis dan menguntungkan rakyat.

PERTAMBANGAN, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN EKOWISATA

Kooptasi Konsepsi Klasik dalam Praktik Teranyar

Pembangunan berkelanjutan selalu menegasi-kan pengeksploitasian yang berlebihan terhadap kekayaan alam suatu wilayah. Rusaknya alam akan menambah runyam pelbagai persoalan sosial dan politik yang terjadi di wilayah tersebut (Anger, 2010). Contoh kasus yang diangkat Barnes Anger pada kemiskinan yang mengekor di belakang pembangunan berkelanjutan yang coba digalakkan di sana berbasis konsep *Millenium Development Goals* (MDGs), memiliki kritik utama yakni, eksploitasi alam tidak akan menjamin adanya kesejahteraan dan perbaikan angka kemiskinan yang merata. Secara ekstrim Anger malah merekomendasikan agar eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan misalnya dalam aktivitas pertambangan harus dihentikan. Moratorium ini bukan sekadar penangguhan sementara, melainkan penghentian total agar ruang-ruang kreativitas dan kemampuan masyarakat untuk *survive*, khususnya berdasarkan pandangan dan karakteristik lokalnya bisa dimunculkan ke permukaan. Kelestarian lingkungan yang ditempatkan di bagian akhir dalam kajian komprehensif mengenai Nigeria, bahkan ditempatkan sebagai salah satu elemen penting yang seharusnya memperoleh aksentuasi dalam praktik penerapan pola pembangunan berkelanjutan. Kelestarian lingkungan hidup akan menjamin adanya apresiasi yang seimbang terhadap unsur-unsur pembangunan lainnya.

Negara maju yang tetap memiliki hasrat untuk menguasai sebanyak mungkin pasokan bahan baku dari negara berkembang tetap akan memberikan keleluasaan dan kesempatan mengeksploitasi lingkungan hidup khususnya kepada kaki tangan

pengusaha bidang pertambangan yang ada di negara berkembang. Cara-cara klasik dalam membangun organisasi dan korporasi internasional masih terus menggunakan pola penekanan lama. Hal ini juga yang merupakan kritik terhadap penerapan SD yang terbaru dengan visi baru yakni pembangunan manusia demi pengentasan kemiskinan, tetapi tetap menggunakan cara-cara klasik, khususnya dalam mengeruk keuntungan secara sepihak dari eksploitasi alam (Bagire & Namada, 2011).

Praktik penerapan ideal SD yang teranyar masih tetap diboncengi oleh kepentingan bisnis dengan gaya klasik. Tekanan korporasi besar dari negara maju yang cenderung agresif seakan disempurnakan oleh kelemahan manajemen dan kapasitas negara berkembang yang masih jauh dari proporsional. Untuk itu, dua kelemahan besar yang sepantasnya harus diatasi oleh pendekatan SD berbasis kontekstualisasi secara teoretis adalah penyadaran (*enlightenment*) yang terus-menerus dalam penerapannya di negara-negara yang masuk dalam kategori negara berkembang dan adaptasi etika yang kuat pada semua korporasi dan organisasi internasional.

SD dan Ekowisata hanyalah Senjata Negara Berkembang?

Seringkali SD hanya dipandang sebagai senjata negara berkembang untuk segera sejajar dengan negara maju. Posisi tawar kelestarian alam hanyalah wacana yang dihembuskan agar negara maju bisa memberikan kompensasi secara ekonomi lewat bantuan sumbangan dan pinjaman. Sebaliknya negara maju menganggap SD tidak lebih dari perumusan konsep-konsep tradisional ke dalam sistem pembangunan mereka yang dikategorikan modern. Negara maju yang hadir dengan perkembangan industrialisasinya yang mutakhir akan merasa terpojok dengan konsep ini.

SD bahkan dianggap sebagai konsep yang tidak bisa disesuaikan dengan kondisi yang tidak menjamin adanya sebuah kelangsungan (*Unsustainable Condition*). Oleh karena itu, konsep SD cenderung hanya menjadi tameng dan senjata yang sering dipakai dan dianggap sekadar untuk menaikkan posisi tawar negara berkembang (Bhalachandran, 2011). Ketika konsep SD menjadi banal dan stagnan, Bhalachandran menganjurkan agar pola pendekatan dilakukan dengan menguatkan karakteristik lokal. Penajaman ini akan menguatkan posisi negara-negara berkembang tanpa harus masuk dalam metode dan teori yang mengukuhkan kedigdayaan

negara-negara maju. Ia bahkan yakin bahwa semua negara berkembang memiliki pola-pola klasik dalam mengusahakan dan mengambil kekayaan alamnya tanpa merusak hutan dan lingkungan hidup.

Pertambangan dengan cara-cara modern berupaya mengakumulasi keuntungan yang besar, namun memenuhi ruang teknologinya dengan alat-metode-pemikiran yang tidak sensitif terhadap alam. Padahal, pertambangan yang sudah hampir setara usia manusia. Eksploitasi dalam skala apapun seharusnya mempersiapkan perbaikan yang (bahkan) harus lebih baik dari kondisi alam sebelumnya. Selain alam, pertambangan dalam konsep SD ini juga harus bisa mengangkat derajat hidup manusia yang mestinya nyata bukan utopis.

Pertambangan dalam SD membutuhkan *Network* yang Manusiawi

Pertambangan bukan sekadar urusan pemerintah dan korporasi tambang, apalagi komunitas eksklusif pengusaha tambang. Pertambangan membutuhkan dialektika ide, cara, pola hingga rehabilitasi alam yang menggabungkan secara holistik dan mutlak, semua pemangku kebijakan (*stakeholder*), semua pemilik investasi dan modal (*shareholders*) dan yang terpenting semua masyarakat yang menghidupi areal sekitar, yang selama sekian waktu menikmati dan memenuhi kebutuhan hariannya dari alam. Melupakan salah satu elemen adalah membiarkan konspirasi yang menghancurkan visi ini secara bersama. Kerja sama yang integratif, terbuka dan terpercaya adalah sesuatu yang niscaya dalam dialektika ini. Karena, hanya dengan kerja sama ini transfer teknologi dan pengetahuan yang bisa memanusiakan manusia dan menjamin adanya kelanjutan lingkungan hidup dapat terjadi (Paassen, 2011). Pertambangan dengan teknik sempurna yang memberikan ruang hidup kembali kepada lingkungan hidup sebenarnya bisa menjamin adanya pertanian yang berkelanjutan pasca pertambangan yang proporsional. Pertambangan juga bisa menjamin adanya kelanjutan penggunaan dan penerapan teknologi lainnya seperti *bio-energy* yang ternyata bisa dijalankan oleh mereka yang memiliki pengetahuan terbatas. Kecerobohan untuk menghabiskan potensi-potensi alam justru akan menjadi masalah klasik dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya mineral. Dan yang tersisa dari pola klasik dalam mengejar keuntungan ini adalah rusaknya alam yang tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk kepentingan apapun.

Tanpa jaringan yang kuat dengan posisi saling kontrol dan saling mengkritisi secara konstruktif, ideal pembangunan berkelanjutan dalam pertambangan hanyalah wacana yang kian hari kian menyengsarakan. Jejaringan kerja yang luas, jejaringan apresiasi terhadap semua elemen inilah yang menjamin adanya moralitas dan keutamaan nilai dikedepankan. Dari nilai-nilai inilah SD memiliki jaminan kematangannya.

Pertambangan Membutuhkan Pemerintahan Kuat yang Pro-rakyat

Pemerintahan kuat yang dimaksudkan di sini bukanlah sesuatu yang berafiliasi dekat dengan represivitas dan kediktatoran, melainkan lebih merujuk kepada sesuatu yang bisa memenuhi ekspektasi publik mengenai tata pemerintahan yang baik. Merujuk pada konsepsi *good governance*, SD sebaiknya bisa menghadirkan nuansa ini, karena hanya dengan teguh dan terus membangun komitmen pada tata pemerintahan yang baik, SD bisa terus dihidupi pun SD bisa terus memunculkan sirkulasi pemerintahan yang baik dan dapat diperbaiki (*reform-able*).

Pasca konvensi Rio, ada empat hal mendasar yang harus digarisbawahi dan sebenarnya harus masuk dalam program pengembangan dan pendalaman lanjutan. Keempat hal tersebut adalah, peningkatan kualitas pengetahuan dan pendidikan dasar, Pengembangan kajian pembangunan berkelanjutan, kesadaran publik yang mesti diwarnai semangat kritis-konstruktif mengenai kelestarian alam hingga beragam pelatihan dan promosi mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan alam yang manusiawi (Parashcivescu & Botez, 2011, Hahn & Knoke, 2010).

Pendidikan menjadi dasar penting, karena pendidikan dan kematangan yang nampak dalam apresiasi terhadap makna dan peran SD merupakan salah satu bagian utama yang akan membentuk pola pikir, pola tingkah laku dan pola kebijakan yang benar dan baik terhadap alam. Mengabaikan pendidikan dengan sendirinya berarti membentuk manusia-manusia tanpa basis pengetahuan yang mungkin saja akan mengakhiri kelestarian alam dan kelanjutan pembangunan itu sendiri.

Ada dua hal pokok yang menjadi kajian klasifikasi dan identifikasi Parashcivescu dan Botez yakni, apa saja yang masuk dalam kajian pembangunan dalam artian harus dikembangkan dan apa saja yang harus dilestarikan. Yang harus dikembangkan

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan pembangunan komunitas/sosialitas serta aspek-aspek bawaannya. Sedangkan yang harus dilestarikan dan dijaga karakteristiknya adalah, budaya, komunitas-komunitas lokal dengan keunikan dan sumbangannya masing-masing, ekosistem, lingkungan hidup, sumber-sumber alam pendukung kehidupan manusia, keanekaragaman hayati dan secara khusus hutan dan begitu banyak unsur hidupnya. Jika pengetahuan akan hal-hal ini belum menjadi sesuatu yang niscaya, maka diskursus mengenai SD akan sangat lemah dan tidak memiliki basis argumen yang kuat. Dan semua ini akan berimplikasi buruk pada hilangnya manajemen organisasi dan individu yang bisa dengan mudah mendatangkan ketamannya khususnya pada pengelolaan alam dalam dunia pertambangan.

Pendidikan dan Pembentukan Pola Kepemimpinan yang Pro-SD

Aktivitas pertambangan membutuhkan bukan sekadar orang terpelajar, melainkan lebih kepada orang yang terdidik untuk mencerna dan memberikan penghargaan kepada alam. Apa yang terjadi pada kisruh kasus pertambangan di beberapa daerah periferi Indonesia lebih kepada kesempatan mengeruk yang terbuka dan tidak terdidiknya semua mereka yang kebetulan memenangkan kontestasi politik dan menjadi pemimpin, serta semua mereka yang mengambil keuntungan berlebihan pada ranah ini.

Semua pemimpin yang berorientasi pada harapan dan kualitas hidup yang lebih baik di masa mendatang adalah pemimpin yang visioner yang legowo untuk dibentuk oleh dan serentak membentuk SD yang mapan. Tanpa kekuatan ini, pemimpin hanya akan berkonsentrasi pada pesta politik lima tahunan. Jika dasar pendidikan mengenai SD tidak kuat, maka pemerintah dan berbagai kebijakannya akan terpaung pada pertumbuhan ekonomi yang terkadang absurd dan hanya bermain di level makro tanpa memerhatikan keseimbangannya dengan dua titik lainnya yakni pertumbuhan dan keadilan sosial serentak kelestarian lingkungan hidup.

Kisruh berbagai tambang emas, mangan, dan berbagai mineral lainnya di begitu banyak kabupaten di NTT membuktikan dengan jelas bahwa pemerintahan dijalankan hampir tanpa pola-pola yang visioner. Pemerintah seolah-olah hadir hanya sebagai pemenuh harapan masyarakat selama lima tahunan. Hal ini bisa diperoleh dari menjiplak

karakteristik pemerintahan di level Provinsi dan Pusat yang juga berjalan tidak karuan.

Mengapa pemerintahan cenderung berorientasi pada pertambangan? Jawaban sederhananya, karena pemerintah belum bisa independen dalam memanejemen pembangunan berkelanjutan di sektor-sektor penting seperti pertanian dan peternakan. Studi kasus yang dibuat Dai dan Zhang (2010) yang dilakukan di Provinsi Jilin, China membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian akan memberikan manusia kesempatan yang lebih luas dalam mengumpulkan *human capital* dan *social capital*-nya.

Beberapa hal yang tidak dilakukan di NTT dalam beberapa program pembangunan berkelanjutan yang amburadul khususnya di bidang pertanian dan peternakan serta perikanan dan kelautan adalah, berorientasi pada manusia bukan pada modal semata, mampu mengadaptasikan teknologi secara benar, mengubah struktur organisasi yang pro-status quo dan yang mengingkari produktivitas, memperbaiki pengembangan kemampuan berwirausaha lewat produksi yang proporsional dan manajemen pemasaran yang profesional. Pemerintah cenderung mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari sektor pertambangan, dan dengan sendirinya tidak mau terbuka untuk menerima dan mengadaptasikan dan menginstal kebaruan pola-pola pendekatan SD dalam kepemimpinannya. Semua yang berhubungan dengan pertanian, peternakan dan hal-hal vital terlanjur dianggap tidak menguntungkan, terlalu mahal teknologinya dan berbelit prosesnya. Dai dan Zhang mengatakan bahwa persoalan SD bukan persoalan bisa atau tidak bisa, melainkan persoalan mau atau tidak mau.

Pendidikan dan Pertambangan (yang Wajar) untuk Rakyat

Lantas, apakah pertambangan harus ditolak total? Ada dua aliran besar dalam pendekatan sosial khususnya menyangkut eksploitasi dan eksplorasi sumber daya berbasis pendekatan SD. Kelompok pertama yang percaya terhadap pengembangan teknologi dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan akan memberikan peluang untuk pertambangan sampai batas-batas tertentu, khususnya untuk produk pertambangan yang bermanfaat bagi PAD maupun kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kelompok kedua yang lebih radikal dan berakar pada apresiasi terhadap kelestarian lingkungan hidup, hutan dan keuntungan keanekaragaman hayati

untuk manusia akan menolak dengan tegas semua jenis pertambangan.

Pertambangan yang ditolak lebih kepada alasan bahwa ketika pemahaman mengenai SD belum holistik dan sempurna, ada kemungkinan akan ada kekeliruan dan error yang membahayakan di dalam dan bagi pengambilan kebijakan. Ketika kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi publik dan juga dunia global, maka ketakutan akan kehancuran lingkungan hidup yang kian parah akan semakin besar. Perubahan iklim, kerusakan lapisan ozon, pemanasan global, emisi karbon akan semakin sulit dikontrol (Glover, 2010). Selain pertambangan, sektor penting lainnya yang masuk dalam evaluasi SD adalah perkebunan yang sering mengalihfungsikan hutan. Substitusi dari ditolaknya pertambangan, orang cenderung lari dan berkiblat pada perkebunan. Dan justeru perkebunan juga merupakan bagian dari pengrusakan lingkungan secara masif.

Pendidikan bisa direkayasa untuk hanya mengutamakan kepentingan pertumbuhan ekonomi sembari menghancurkan alam dan manusia. Model pendidikan seperti ini harus ditolak dan segera direvisi. Pertumbuhan ekonomi apalagi dari sektor pertambangan yang tidak sensitif terhadap kelestarian lingkungan hidup, budaya dan sosialitas manusia adalah sesuatu yang tidak wajar (Alam, 2010).

Orientasi Global Tidak Menghancurkan Posisi Indonesia (Khususnya NTT)

Memikirkan kehadiran dan posisi Indonesia di tengah perkembangan negara-negara dunia mengandaikan adanya pemahaman yang purna akan kontinuitas dan keberlangsungan nilai-nilai pembangunan serta pembangunan ini di Indonesia sebagai bagian yang tak bisa dipisahkan dari kultur global, regional dan beragam kerja sama internasional. Hal ini pula yang menjadi cerminan sekaligus tolak ukur sejauh mana pembangunan di Indonesia bisa dikategorikan berkembang, khususnya pembangunan manusia dan kesanggupan Indonesia masuk dalam kompetisi global dengan segala karakteristik dan keunikan pembangunan yang ada. Indeks manusia Indonesia tentunya mengarah ke kurva yang semakin membaik, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi, belum tentu menjamin adanya kesejahteraan di level akar rumput (*grass root*). Pertumbuhan ekonomi justeru di sisi lain yang tak dapat diprediksi akan menghasilkan kesenjangan yang tentunya membuat miris banyak pendukung fanatik

dari teori-teori pembangunan dan ekonomi yang dijalankan tunggal/eksklusif/mutlak dan bukan eklektik, terpadu dan dialektis.

Kemiskinan yang ada di Indonesia dengan grafik pertumbuhan penduduk miskin secara gamblang telah membahasakan dengan jelas bahwa ada salah urus negara ini, khususnya dalam mencari model, pendekatan dan manuver pembangunan yang tepat. Pertanyaan penting di titik ini, salah urus dan indeks kemiskinan yang terus bertambah dengan rasio besar yang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di zona Asean ini menjadi tanggung jawab siapa? Perkembangan globalisasi dan pasar bebas? Pengelola negara Indonesia sendiri? Pengusaha dan korporasi (pun korporasi internasional-MNC) yang menggeluti beragam bisnis di Indonesia? Atau memang manusia (warga negara) Indonesia sendiri yang telah menjadi penyebab dari meningkatnya pertumbuhan penduduk miskin di Indonesia.

Kelompok yang pesimis dengan Indonesia dan seluruh kekayaan alam, modal tenaga kerja dan beragam potensi pertumbuhan positifnya tentu akan mengklasifikasikan negara ini ke dalam kelompok negara gagal (*failed state*), atau mungkin pada tataran ekstrim, akan ada pemikiran yang bisa jadi mengkhianati konstitusi RI dengan paham federasi, separatisme dan lain sebagainya. Mungkin juga ada yang tetap optimis dengan peluang Indonesia hadir sebagai bagian dari pola permainan dunia tentunya di lingkungan ekonomi (*world class player*) dengan begitu banyak potensi yang dimiliki yang akhirnya akan berhulu pada pencapaian kesejahteraan (*welfare*). Boleh jadi juga, Indonesia bisa dipandang sebagai negara yang biasa-biasa saja, dan akhirnya menggiring orang untuk acuh-tak-acuh, cuek dan menyuburkan rasa indifrentisme dalam bernegara.

Salah satu kesulitan mengidentifikasi posisi Indonesia di tengah globalisasi dengan begitu banyak varian definisi, teori dan implikasi teori serta relevansinya atas realitas adalah bahwa desain perkembangan dan pembangunan Indonesia cenderung masih berkiblat pada apa yang datang dari luar. Posisi Indonesia menjadi lemah di titik ini, karena seperti tiga harimau kecil Asia (Singapura-Taipei-Hongkong) Indonesia belum mandiri dalam menentukan model, pola/cara, target, posisi kelanjutan dari perkembangan dan pembangunan itu sendiri. Dari sisi epistemologi pembangunan, Indonesia belum mampu menggunakan teori anak negeri untuk membahasakan corak pembangunan yang mau diterapkan,

khususnya dalam mempercepat kemajuan dan mengentaskan kemiskinan. Indonesia senantiasa terpacu pada definisi, hasil survei dan juga beragam penelitian luar yang dibuat di sini, tanpa berusaha menggunakan kesempatan yang telah disediakan globalisasi sendiri untuk menenun karakteristik. Untuk beberapa kesempatan, hal ini tentunya bukan merupakan masalah serius, negara ini masih mampu menggunakan pendekatan gabungan (eklektik) dalam mencerna proses filosofis, teknis dan taktis dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan negara ini secara total. Walaupun hal itu bisa menjadi miris ketika Indonesia dihadapkan dengan situasi di mana begitu banyak akademisi dan kelompok intelektual ternyata menggeluti dengan enaknya berbagai varian teori pembangunan dari luar, namun justru meninggalkan ke-Indonesia-annya sendiri. Tapi, sekali lagi, ini bukan menjadi masalah serius dalam menengarai konsepsi, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dan pertumbuhan yang ada. Indonesia *toh* belum kehilangan identitas sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kaya dan bangsa yang beradab.

Sebuah awasan penting yang bisa dilesakkan di titik ini adalah bagaimana Indonesia sebagai negara berdaulat dan bangsa yang besar bisa menenun sendiri dengan bebas pembangunan dan corak perkembangannya di tengah arus globalisasi yang gilang-gemilang ini. Tentunya, pemimpin bangsa ini, kalangan cerdik-cendikia, tokoh-tokoh agama, masyarakat dan seluruh elemen bangsa ini sudah saatnya sadar dan mau berkiblat pada perubahan dunia global yang kian hari kian cepat. Dan tetap masih ada harapan untuk hadir sebagai bagian tak terpisahkan dari globalisasi, serentak berjuang untuk mengangkat nilai-nilai lokal, menyumbangannya untuk kemajuan bangsa ini demi tenunan sempurna yang khas Nusantara.

Indonesia (Masih Menjadi) Bagian dari Ekonomi Dunia (?)

Bagai kerbau yang dicocok hidungnya, kondisi sosial-politik Indonesia terbilang masih labil dan berada di bawah standar. Ini juga yang menjadi alasan, Indonesia berada di antara ada dan tiada. Ada tapi tidak memiliki sumbangan yang berarti bagi kualitas hidup rakyat kebanyakan yang hidup di bawah garis kemiskinan, ada namun tidak bisa berbuat banyak ketika hampir separuh lahan pertanian milik masyarakat dikuasi oleh konglomerasi dan kekuasaan ekonomi yang monopolistik. Untuk level

regional mungkin Indonesia bisa hadir sebagai salah satu bangsa di Asean yang memiliki luas wilayah cukup besar, namun apakah ini seimbang dengan kondisi Indonesia yang lemah dalam sumber daya, sampai-sampai lebih dikenal sebagai “bangsa jongos bahkan oleh Malaysia yang hanya merupakan negara hasil dari dinamika aneksasi beberapa negara adidaya?

Dari telaah Strukturalis ataupun neo-strukturalis, Indonesia sepantasnya melakukan perubahan-perubahan yang signifikan termasuk dalam cara berpolitik dan berdemokrasi. Demokrasi asli Indonesia sudah lama berkembang subur dan ternyata diapresiasi oleh begitu banyak negara di dunia, bukan demokrasi dengan penghitungan suara ala Westminster yang terkadang rasional, namun menghancurkan psikologi dan kerja sama tim. Pembaruan struktur dan cara berpolitik serta membangun kerja sama luar negeri akan membantu Indonesia menemukan pasar dan kiblat ekspor yang baru, jika negara-negara besar yang memiliki kecukupan modal memainkan politik ekspor-impor yang ketat sebagai konsekuensi dari penerapan SAP (*Standard Adjustment Program*) dan LOI (*Letter Of Intent*). Konfrensi Asia Afrika yang digagaskan Soekarno beberapa dekade silam, tentunya bisa menjadi modal Indonesia bermain lebih cantik di kancah Internasional dalam bayang-bayang globalisasi tanpa harus tercerabut dari akar Indonesia yang santun dan taat pada norma. Indonesia dan NTT khususnya harus tegas untuk menolak segala bentuk pengkooptasian berbasis SAP dan LOI, khususnya yang mengarah pada kehancuran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sepantasnya juga Indonesia memastikan adanya dengan meninggalkan sebanyak mungkin potensi menjadi miskin dan terbelakang, khususnya pada peningkatan kualitas dan ketrampilan (*skill*), bisa menemukan celah untuk peningkatan nilai tambah, serta bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi tinggi serta bisa menemukan (inovasi) teknologi-teknologi baru yang nantinya akan meninggikan wibawa dan posisi Indonesia dengan sendirinya.

Kesempatan ini juga akan menjadi saat di mana Indonesia mampu kembali memperbaiki citranya (khusus dalam angka kemiskinan) mulai dari lingkup kerja sama Asean, regional Asia, dan akhirnya di hadapan seluruh dunia. Beberapa cara mudah yang bisa dibuat adalah merangsang pasar rakyat untuk makin kompetitif, melibatkan LSM dan lembaga serta organisasi lainnya untuk mendukung perbaikan

ketrampilan dan tingkat pencerahan masyarakat, serta berkiblat pada investasi di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu kanal Indonesia memperkuat barisan tenaga teknis, ahli dan pakar di semua bidang kehidupan.

Indonesia masih sangat layak menjadi bagian dari ekonomi dunia dengan karakteristik pembangunan yang harus khas. Indonesia belum layak dipensiunkan dari eksistensinya dalam memajukan dan mengembangkan standar hidup penduduknya sendiri khususnya dan komunitas peradaban dunia umumnya.

Jalan Indonesia: Jalan Kemanusiaan

Tentunya, harapan untuk menjadi lebih baik dan lebih bermartabat tidak selamanya harus dijalankan dengan mengedepankan revolusi sosial (orientasi pemikir radikal dalam *dependencia*), pun tidak melulu harus mengikuti arus liberal yang berorientasi kapital semata dalam hal peningkatan produktivitas. Posisi Indonesia lebih tepat belajar dari China yang lebih dahulu telah berhasil sebagai negara sosialis-komunis yang memainkan dengan nyamannya mekanisme pasar kapitalis-liberal dan memberi keuntungan yang tidak sedikit bagi China sendiri.

Dialektika eklektis antara berbagai kebaikan (*bonum*) yang dihadirkan oleh begitu banyak pendekatan akan membawa Indonesia bisa menenun kesempurnaannya sendiri dalam pembangunan standar hidup, kualitas pekerjaan dan juga pemerataan dan pemangkashabisan kesenjangan sosial yang ada. Tujuan lain yang dikejar, bukan saja kesejahteraan sosial (*welfare*), namun juga keadilan dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan (*workfare*) sesuai amanah konstitusi negara ini.

Kemiskinan dan kemelaratn mungkin adalah lahan tempur dan lahan perjuangan terbaik untuk kelompok radikal-sosialis dan semua intelektual yang muak dengan kemapanan semua (*status quo ante*) yang dibangun kelompok pemilik modal (kaum borjuis), namun untuk level Indonesia, kemiskinan dan kemelaratn mungkin adalah ruang terbuka baru bagi dialektika ide dan dialog yang dialogis antara semua elemen bangsa ini dalam “duduk bersama” untuk menemukan solusi, cara pengentasan dan pola serta model kemajuan dan pembangunan yang sesungguhnya.

Kemiskinan dan kemelaratn juga adalah salah satu jalan terbaik bagi semangat untuk menumbuhkan militansi terhadap ethos dan perilaku kerja yang lebih manusiawi, kompetitif, penuh kreativitas dan

inovasi. Kultur kolektif Indonesia yang kuat sepatasnyalah dipakai sebagai salah satu jaring pengaman masyarakat yang sesekali mungkin terpeleset dalam berbagai bentuk krisis akibat salah memosisikan diri pada ruangan globalisasi yang luas. Angka kemiskinan di NTT bisa dihapus atau dikurangi dengan membuka ruang bagi sektor-sektor non-pertambangan. Pertambangan hanya menyejahterakan segelintir orang. Pertambangan hanya menjadi lahan untuk mengeruk dan menghancurkan lingkungan hidup. Dan untuk itu menolak pertambangan untuk keselamatan manusia dan keselamatan kinerja manusia adalah sesuatu yang penting.

Berkiblat pada Yang Global, Memilih Yang Lokal

Bukan rahasia umum lagi bahwa Indonesia dalam banyak hal senantiasa tertinggal dalam inovasi, merasa inferior dalam budaya dan akhirnya tergerus untuk senantiasa menerima tanpa filtrasi semua yang datang dari luar. Mulai dari acara-acara berbau Korea di televisi untuk kelompok kategorial remaja, hingga pilihan acara sepak bola level dunia. Semuanya diterima Indonesia tanpa sensor, sekaligus tidak bisa memacu kreativitas, daya saing dan perbaikan posisi Indonesia. Di bidang seni dan budaya, kemajuan dan pembangunan teknologi di Indonesia tidak sejalan dengan konsumsi masyarakat yang berlebihan dan juga kemampuan masyarakat mencerna dan kemampuan sumber daya masyarakat, hal yang sama terjadi juga di sektor-sektor lain. Pembangunan properti perumahan yang luar biasa menjamur membuat begitu banyak aspek lainnya diantar ke gerbang kehancuran, petani kehilangan lahan garapan, komunikasi antar-tetangga terpuruk, manusia Indonesia menjadi semakin individualis, kesempatan mengabdikan pada kebenaran dalam usaha membongkar derita dan kesusahan menjadi dangkal. Manusia Indonesia kehilangan solidaritas, keprihatinan dan tanggung jawab sosial (*care*) satu sama lain.

Persiapan Indonesia yang kurang ketika membenturkan dirinya pada zaman globalisasi yang gila-gilaan ini tentunya bisa menjadi paradoks yang akut dan bisa membuat Indonesia hadir sebagai bangsa yang kehilangan identitasnya. Awasan filosofis dari Taufik Ismail sang pujangga telah dilesakkan ke tengah bangsa ini sebelum globalisasi menari dengan indahnya di bumi pertiwi, “Juru Peta Yang Agung, di manakah Tanah Air Kami?” Semua ini harus menjadi dasar bangsa ini bisa merevisi, merestrukturisasi dan membarui diri untuk membangun dasar yang

kokoh di atas ruang terbuka bernama globalisasi yang bisa saja menyuguhkan madu dan racun pada waktu yang bersamaan.

Berkiblat pada yang global, namun memilih, mencintai dan terus menerus mengembangkan yang lokal dalam konteks pembangunan manusia, pembangunan karakter, pembangunan sumber daya yang seutuhnya adalah sebuah yang niscaya harus didahulukan. Manusia-manusia Indonesia yang cerdas, terdidik, pintar, kreatif, inovatif dan super tentunya diharapkan menjadi pemangkas kesenjangan yang hidup di antara yang kaya dan yang miskin, pun hadir sebagai pengentas kemiskinan yang sudah akut di negara ini. Hal ini juga menuntut kemendesaan dan sikap kritis masyarakat Indonesia umumnya dan NTT khususnya untuk mengerti dengan baik bahwa ada salah kelola pertambangan yang tidak layak dan tidak berguna. Pertambangan dalam jenis apapun harus dihentikan dan dibubarkan dari NTT, karena posisi geografis NTT sangat tidak mendukung (NTT terdiri dari pulau-pulau kecil yang rentan kerusakan ekologis yang fatal). Memilih yang lokal mengandaikan adanya pemberdayaan dan peningkatan sektor lain selain pertambangan.

REKOMENDASI SD BAGI KISRUH TAMBANG NTT (BERBASIS “ETHICS AND THE ENVIRONMENT” DALE JAMIESON)

Mengubah Ide Dasar dan Orientasi

Berbasis konsep warisan sejarah dan tradisi serta budaya yang harus dijadikan situs, sebenarnya NTT dengan posisi geografisnya yang mendukung dan juga aset alamiahnya yang asri bisa menyajikan tawaran lain untuk meningkatkan income per kapita (PAD)-nya, bukan dari sektor pertambangan melainkan bergeser ke sektor yang lebih ramah lingkungan, pariwisata misalnya. Dengan ditetapkannya Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia dan ketika Taman Nasional Komodo (TNK) di wilayah Kabupaten Manggarai Barat menduduki salah satu dari sekian banyak peringkat situs peninggalan yang harus dirawat dan dilestarikan, suara sektor pertambangan sebenarnya bisa langsung dihentikan.

Saatnya hal-hal yang berkaitan dengan budaya, sejarah dan dimensi-dimensi tradisi menjadi titik-titik konsentrasi baru dalam dialektikanya dengan ekonomi, sosial-lingkungan hidup dan pembangunan *civil society* yang merupakan empat pilar dasar SD (Lira, 2010). Budaya juga merupakan rumah singgah yang paling nyaman dan kritis terhadap kecenderungan-kecenderungan yang terkadang tidak sehat sebagai

konsekuensi dari globalisasi. Konsentrasi pada budaya dan pariwisata yang dikelola secara profesional tentunya tidak akan mengurangi derajat NTT bahkan bisa membangun budaya, mentalitas, ethos yang terarah pada kreativitas yang tak terpasung oleh hasil-hasil instan dari mengeroyol alam. Pertambangan mungkin saja akan berhenti pada titik di mana segala yang harusnya diambil telah selesai diambil, namun budaya tidak.

Revitalisasi Sadini Mungkin

Kerusakan hutan dan lingkungan hidup serta tatanan kultural masyarakat yang sudah terjadi akibat terlanjurnya pemerintah yang salah dalam mengambil kebijakan soal pertambangan sekiranya harus bisa dibereskan sebelum terlambat. Begitu banyak hutan produktif yang dibabat untuk kepentingan eksploitasi sektor pertambangan (deforestasi) sedapat mungkin dikembalikan lagi menjadi fungsi semula lewat proses reforestasi yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh dengan melibatkan masyarakat hingga ke level yang paling bawah.

Revitalisasi ini juga harus ditopang oleh keseriusan pemerintah menyiapkan kader dan tenaga-tenaga terbaik yang mengkaji secara khusus mengenai dampak lingkungan dan mengakhiri aktivitas pengrusakan hutan secara masif. Pengetahuan dan pendidikan yang tinggi khususnya dalam SD dan bagaimana menyelamatkan keanekaragaman hayati harus masuk dalam kajian pemerintah. Lewat riset dan inovasi mentalitas instan yang terlanjur terbentur di tengah masyarakat bisa diatasi. Revitalisasi ini juga harusnya melihat nilai luhur dan etika yang hidup dan berkembang secara kontekstual di wilayah NTT. Revitalisasi dengan menggunakan mutlak semua metode yang datang dari luar tanpa mengadaptasikannya dalam formula local genius yang ada akan mengaburkan posisi kepemimpinan, kebijakan dan kapasitas yang dibangun (Ahmed, 2011).

Nilai-nilai lokal menurut Ahmed juga bisa diandalkan dalam membentuk pedoman, kaidah dan prinsip-prinsip. Pembangunan berkelanjutan juga bisa disusun berdasarkan keutamaan-keutamaan yang berciri humanis yang hidup di wilayah tertentu.

Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Relasi Pemerintah-Masyarakat

Selain pendidikan dan pelatihan, kapasitas pemerintah juga bisa diperluas dengan dukungan kuat dari elemen-elemen akademisi. Relasi pemerintah dengan representasi masyarakat khususnya mereka

yang terpelajar akan membuka wawasan dan cara pandang pemerintah yang baru dengan tidak lagi menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan semata, melainkan subjek yang memiliki peran penting dalam kebijakan, pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Relasi mutual antara pemerintah dan masyarakat juga bisa dihadirkan dalam kerja sama elemen pemerintahan dengan masyarakat, sembari tidak jatuh ke dalam “politik permainan dan relasi tak senonoh antara pemerintah dan swasta yang memiliki investasi di bidang pertambangan. Kerja sama ini akan makin sempurna, jika suara kritis media didengar dan ditindaklanjuti. Relasi pemerintah dan masyarakat bukan untuk menghancurkan alam secara baru, melainkan untuk mendukung usaha revitalisasi dan pengembalian fungsi lingkungan hidup yang sementara berada dalam keadaan tidak stabil dan maksimal.

Moratorium Pertambangan

Moratorium pertambangan adalah salah satu langkah tepat jika pemerintah memiliki itikad baik untuk memajukan sektor-sektor lain khususnya menghidupkan kembali sektor pertanian dan peternakan dengan pola pendekatan yang lebih modern dan profesional. Moratorium pertambangan juga adalah langkah tepat jika pemerintah perlu mempersiapkan tenaga-tenaga terampil yang tepat dan memiliki kepakaran nantinya dalam dunia pertambangan emas dan mangan.

Situasi ini akan berakhir jika putra-putra terbaik NTT sudah cukup siap dalam membentuk pertambangan yang benar-benar dipersembahkan untuk rakyat. Jika pra-kondisi ini belum bisa dipenuhi, maka moratorium adalah sesuatu yang tepat, atau bahkan pertambangan di NTT cukup sampai pada level galian C (pasir dan batu/sirtu). Dengan demikian emas dan mangan sesungguhnya dipindahkan ke ladang pertanian dan padang-padang peternakan.

KESIMPULAN

Pengusaha pertambangan yang menjalankan bisnis pertambangannya di NTT juga diharapkan bisa sadar diri dan meninggalkan investasinya di bidang pertambangan. Sebagai gantinya pemerintah perlu melibatkan pengusaha-pengusaha lokal NTT dalam pembangunan sektor lain yang lebih ramah lingkungan dan manusia. Ketika Corporate Social Responsibility (CSR) hanya sekadar penghapusan luka dan dosa pengusaha, perusahaan-perusahaan

pertambangan besar yang berinvestasi di NTT dan telah mengeruk keuntungan yang cukup besar bisa menghentikan eksploitasinya dan sesegera mungkin membantu pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program penyelamatan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. CSR dalam banyak hal tidak lebih dari tempat pembuangan yang memiliki kajian penuh manipulasi dan rekayasa untuk mengamankan kepentingan perusahaan (Curtis, 2010). Fakta membuktikan bahwa perusahaan pertambangan banyak mempekerjakan masyarakat dengan penghasilan yang paling minim (detik.com 23 November 2012, akses 5 Januari 2013, 09.45).

Dengan demikian korporasi kecil maupun besar (MNC) harus memiliki respon positif terhadap SD dan kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Jika hal ini tidak diperhatikan dengan baik, pemerintah bisa saja mencabut izin usaha dan juga memberi rekomendasi yang buruk jika MNC itu beroperasi di beberapa negara. Propaganda negatif pemerintahan yang bersih akan membuat MNC sangat berhati-hati. Konsep ini terka-dang lemah, karena korporasi besar selalu meng-ekor secara politis di balik suksesi dan perjalanan sebuah kepemimpinan politis (Escobar, 2011). Pertambangan di NTT selalu menjadi sesuatu yang kontroversial. Dibutuhkan bukan sekadar konsistensi, melainkan nurani dan kepekaan bukan karena siapa dan apa, melainkan untuk siapa dan apa.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, A. 2011. “Leadership, Capacity Building and Sustainable Development in Contemporary Africa”. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, Vol.7, No. 2,3,4, pp. 101-111.
- Alam, S. 2010. “Globalization, Poverty and Environmental Degradation: Sustainable Development in Pakistan”. *Journal of Sustainable Development*, Vol. 3, No. 3.
- Anger, B. 2010. “Poverty Eradication, Millenium Development Goals and Sustainable Development in Nigeria”. *Journal of Sustainable Development*, Vol. 3, No. 4, pp. 138-144.
- Bagire, A., Vincent, & Namada, M.J. 2011. “Strategic Management in Africa: Tracing Gaps in Sustainable Development”. *Journal of Marketing Development and Competitiveness*, Vol. 5(7), pp. 72-80.
- Bhalachandran, G. 2011. “Kautilya s Model of Sustainable Development”. *Journal of Humanomics*, Vol 27.1, pp. 41-52.

- Braun, D. 2010. "External Review Sustainable Development". *Journal of Environmental Policy and Law*, 40.4, Australia, pp. 187-191.
- Curtis, C.V. 2010. "CSR/Sustainable Development?" *IA-ABI/IC*, 25, 4.
- Dai, Xiuying & Zhang, Juan. 2010. "Study on Sustainable Development Ability of Agricultural Product Processing Enterprise in Jilin Province". *International Journal of Business and Management*, Vol. 5, No. 12, pp. 212-215.
- Detik.com*. 23 November 2012, akses 5 Januari 2013.
- Escobar, L., Fernando, & Vredenburg, H. 2011. "Multinational Oil Companies and The Adoption of Sustainable Development: A Resource-Based and Institutional Theory Interpretation of Adoption Heterogeneity." *Journal of Business Ethics*, Vol. 98, 39-65.
- Jamieson, D. 2008. *Ethics and The Environment: An Introduction*. New York: Cambridge.
- Glover, A., & Peters, C., & Haslett, K., Simon. 2010. "Education for Sustainable Development and Global Citizenship". *IJSHE*, Vol. 12. 2, pp. 125-144.
- Hahn, Andreas, W., and Knoke, T. 2010. "Sustainable development and sustainable forestry: analogies, differences, and the role of flexibility". *European Journal of Forest Research*, Dordrecht, Netherlands, pp.129:787-801.
- Indra, R. (Penterj). 2006. *Rehabilitasi Tambang*. Commonwealth CA, NC, Canberra, Australia.
- JPIC KAE & SVD. 2010. "Hal-Hal Rasional Seputar Tolak Tambang," dalam *Kertas Posisi JPIC 2010*. Ende, Nusa Tenggara Timur.
- KBR68H*. 4 Oktober 2012.
- Kompas*, 21 Januari 2012.
- Kompas*, 23 Agustus 2012.
- Kompas*, 5 Desember 2012.
- Lira, S. 2010. "Heritage 2010: 2nd International Conference on Heritage and Sustainable Development". *International Journal of Cultural Property*, Vol. 17, pp. 659-660.
- Nidumolu, R., C.K. Prahalad, and M.R. Rangaswami. 2009. "Why Sustainability is Now the Key Driver of Innovation". *Harvard Business Review* 87(9), 56-64.
- Nkemngu, A., A., Paul. 2011. "Sustainable Tourism as a Springboard for Sustainable Community Development: From Theory to Practice". *The Business Review*, Vol. 18, No. 2, pp. 260-267.
- Norton, B.G. 2005. *Sustainability: A philosophy of adaptive ecosystem management*. University of Chicago Press, Chicago.
- Paassen, V., Annemarie, Ridder, D., Nico, Stroosnijder, Leo. 2011. "Role of an Explorative Model for Learning about Sustainable Development in Burkina Faso". *International Journal of Agricultural Sustainability*, pp. 310-321.
- PADMA NTT. 2012. *Laporan Advokasi Periode Januari-Maret*.
- Paraschivescu, V., & Botez, N. 2011. "Education for Sustainable Development". *ETC Journal*, Vol. 15: 2, pp. 132-140.
- Pos Kupang*, 19 Agustus 2012.
- Pos Kupang*, 1 Oktober 2012.
- Pos Kupang*, 4 Oktober 2012.
- Sharpley, R. (ed. In Chief). 2009. *Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?* UCL-UK. [Chapter 3: Sustainable Tourism Development: A Critique]
- WALHI NTT. 2012. *Laporan Bulanan*, November.